



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

# RENSTRA

DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN

2024 - 2026



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya tahun **2024 – 2026** dapat diselesaikan. Renstra ini dibuat untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya selama Periode 5 tahun kedepan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 bahwa setiap Pimpinan Daerah dan Pejabat Eselon II wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA), pembuatan dimulai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (LAKIP) terlebih dahulu karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan tembusan disampaikan kepada BPKP pada setiap akhir tahun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya tahun **2024 – 2026** masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaan dalam Penulisananya.

Pada kesempatan ini kami berharap kepada semua pihak untuk dapat mendukung program kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya. Dengan dukungan dan terjalannya kerjasama yang baik kami harapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun **2024 – 2026** dapat berjalan dengan baik.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 5 Januari 2025

**KEPALA PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**SUGIYANTO, S.Pt, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19700918199003 1 006**

## DAFTAR ISI

PENETAPAN RENSTRA 2022 – 2023 .....		i
KATA PENGANTAR .....		ii
DAFTAR ISI .....		iii
DAFTAR TABEL .....		iv
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	6
	2.2 Sumber Daya SKPD .....	7
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .....	8
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	17
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	17
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	18
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten Kota .....	18
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	23
	3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	24
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	28
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	29
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA .....	
	..... PENDANAAN INDIKATIF .....	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	34
BAB VIII	PENUTUP .....	35
LAMPIRAN .....		

DAFTAR TABEL

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya ..... 64

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 7

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pertanian Kota Palangka Raya.... 9

Tabel 2.3.2 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Palangka Raya..... 10

Tabel 2.3.3 Realisasi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di Kota Palangka Raya

Tabel 2.3.4 Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2015 – 2019.....14

Tabel 2.3.5 Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2019..... 14

Tabel 2.3.6 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2014- 2019  
..... 14

Tabel 3.4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015..... 23

Tabel. 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah.... 33

Tabel. 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... .. 36

Tabel. 7.1 Capaian dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2019 – 2023..... 42





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam) Telp/Fax. (0536) 3231987 Palangka Raya

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 1.6 /SK/DPKP/I/2024**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :     a.    bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan landasan bagi semua elemen dalam organisasi untuk menentukan arah lima tahun ke depan;
- b.    bahwa Rencana Strategis merupakan pedoman yang mengikat seluruh bagian dari organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dalam kegiatan operasional sehari-hari;
- c.    bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
- Mengingat :     1.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
5.    Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6.    Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12,Tambahan Lembaran daerah Kota Palangka Raya No. 12);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026
- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagai Pedoman atau arah Kebijakan, Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya untuk lima tahun ke depan ;
- KEDUA : RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya bertujuan mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya;
- KETIGA : RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan dasar perumusan kebijakan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berhasil guna serta pelaksanaan tugas dan fungsi akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Januari 2024



**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA,**

**SUGIYANTO, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700918 199003 1 006**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (United Nations Population 2019). Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia diantaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani. Pandemi covid-19 berdampak terhadap keseluruhan tatanan pembangunan nasional, hal ini menyebabkan asumsi dan target pembangunan di RPJMN 2020-2024 perlu melakukan strategi ulang. Pembangunan pertanian diharapkan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang positif dengan perbaikan/perubahan strategi peningkatan produktivitas,





penguatan nilai tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan pertanian jangka menengah ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani di Indonesia. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan). Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan sebagai salah satu wujud penerapan fungsi perencanaan tersebut yaitu menyusun rencana strategis. Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Renstra diatur dalam Penyusunan rencana SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2024-2026, telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut : **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai falsafat Budaya Betang**



Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 3 (Tiga) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut :

“Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri”.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya selama Lima tahun (2024-2026). Penyusunan Renstra Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya khususnya RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2024- 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan selama lima tahun ke depan, serta sebagai acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor terkait lainnya. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bentuk Forum Perangkat Daerah untuk Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) dan kemudian dilakukan Penetapan Perumusan rancangan akhir (Rankhir).

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022–2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana



6. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Revisi Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;



33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Sasaran, Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan Kota Palangka Raya 2024-2026, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Daerah dan Pelaksanaan tugas Pemerintahan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Penyusunan Renstra juga merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra



- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian
6. Penataan prasarana pertanian
7. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak
8. Pengawasan peredaran sarana pertanian
9. Pembinaan produksi di bidang pertanian
10. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
11. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
12. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
13. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian
14. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian
15. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian dan
16. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Adapun susunan organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketahanan Pangan
  - Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - Seksi Distribusi Cadangan Pangan dan
  - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

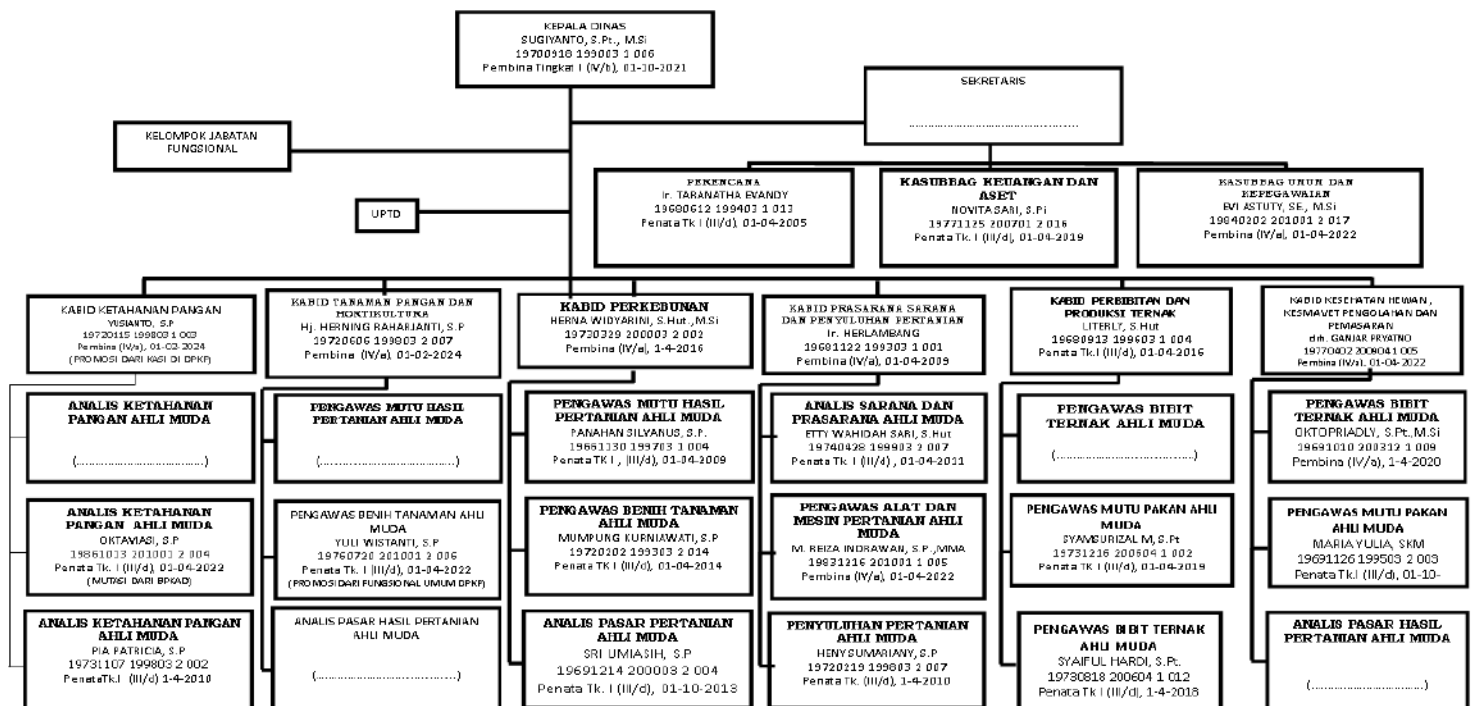


- e. Bidang Perkebunan
  - Seksi Produksi Perkebunan
  - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
  - Seksi Lahan dan Irigasi
  - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian
  - Seksi Penyuluhan Pertanian
- g. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
  - Seksi Perbibitan
  - Seksi Ruminansia
  - Seksi Non Ruminansia
- h. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
  - Seksi Kesehatan Hewan
  - Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- i. Unit Pelaksana Teknis
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berikut disajikan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKARAYA (PERDA NO. 6 TAHUN 2019 -TIFE A)**





Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh sumber daya aparatur yang berjumlah 81 Orang PNS. komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 berdasar tingkat Pendidikan.

Tabel 2.2.1 Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					JUMLAH
		S-1	S-2	D-III	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	8	1	2	-	-	11
3.	Bidang TPH	7	-	1	1	-	9
4.	Bidang Ketahanan Pangan	5	-	-	-	-	5
5.	Bidang PSP	8	1	-	-	-	9
6.	Bidang Perkebunan	5	1	-	1	-	7
7.	Bidang PPT	6	-	-	-	-	6
8.	Bidang Kesmavet	4	1	-	-	-	5
9.	UPTD BBPP Tangkiling	1	1	-	1	-	3
10.	UPTD RPH	1	1	-	2	-	4
11.	UPTD Puskesmas	2			1		3
12.	Penyuluh Pertanian	16	-	2	-	-	18
JUMLAH		63	7	5	6	-	81

Sedangkan untuk Sumber Daya Aset pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat kami dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.2 Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 Sumber Daya Aset

No.	Nama Barang / Aset	Jumlah
1.	Printer Brother MFC –J354ODW	2 Unit
2.	Printer Merk Epson L 3150	1 Unit
3.	Printer Merk Epson L 3250	1 Unit
4.	Mesin Potong Rumput Merk Teco	2 Unit
5.	Meja Kerja	2 Buah
6.	Laptop Merk Asus Zenbook UX325EA i7-1165G7	1 Buah
7.	Komputer All In One Merk AIO Acer Aspire C2-1751C i7	1 Buah
8.	Belanja Pemeliharaan Wc dan Kamar Mandi Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	2 Ruangan
9.	Belanja Penimbunan Halaman (RPH Kalampangan)	1 Tempat
10.	Belanja Pengawasan Pemeliharaan Penyuluhan Pertanian (BPP Kalampangan)	1 Paket



11.	Belanja Perencanaan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP Kalamangan)	1 Paket
-----	--	---------

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya mengalami kondisi sebagai berikut

### a. Bidang Pertanian

Gambaran kinerja pembangunan pertanian Kota Palangka Raya disajikan pada tabel 2.3.1. Berdasarkan tabel 2.3.1, data capaian kinerja produksi tanaman pertanian khususnya produksi tanaman pangan yaitu komoditas padi cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi padi tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan luas panen. Hal ini disebabkan karena lahan di Kota Palangka Raya yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi bukan lahan khusus sawah tetapi sebagian besar adalah lahan gambut, rawa, dan pasir. Selain itu jika dibandingkan dengan komoditas hortikultura, pertanian tanaman padi masih belum menjadi unggulan pilihan utama bagi petani. Kendala lain petani tidak banyak menanam komoditi padi karena biaya produksinya yang besar mulai dari penanaman, pasca panen, sampai ke pemasaran, dimana khusus untuk pemasaran mayoritas konsumsi padi beras masyarakat Kota Palangka Raya masih mengkonsumsi padi beras dari daerah luar, sehingga beras hasil produksi padi lokal masih belum menjadi pilihan utama masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi sayuran mengalami peningkatan secara fluktuatif, dikarenakan kondisi lahan di Kota Palangkaraya lebih sesuai untuk komoditi ini, dan terbukanya pangsa pasar untuk komoditi ini. Dilihat dari produktivitas pertanian, cenderung meningkat secara fluktuatif, walaupun untuk tanaman sayur cenderung menurun tipis. Pertanian yang maju akan terlihat pada peningkatan nilai produktivitasnya. Permasalahan produktivitas pertanian di Kota Palangka Raya bersumber dari kualitas lahan. Produktivitas yang cenderung meningkat dikarenakan adanya kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang bersumber dari dana APBD, APBN dan swadaya masyarakat, antara lain : adanya bantuan alat-alat pertanian, penyaluran benih/ bibit, pembangunan jalan pertanian, optimalisasi lahan , dan jalan usaha tani, serta pembinaan masyarakat pertanian. Khusus tanaman pangan, berikut digambarkan kondisi realisasi pencapaian kinerja :

Tabel 2.3.1 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Palangka Raya

No	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				2020	Proyeksi			Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2024	
1	Produksi Tanaman Pertanian (ton) 1. Padi	4	0,50	4,20	8	4	0,50	4,20	8	4	0,50	4,20	8	
	2. Sayuran	9747	19356	11662	1565	9747	19356	11662	1565	9747	19356	11662	1565	
	3. Buah-buahan	18682	28581,14	13752	1690,75	18682	28581,14	13752	1690,75	18682	28581,14	13752	1690,75	



	4. Karet	3.545,22	3000	3000	3000	3.545,22	3.529,16	3.529,16	3.606,56	3.545,22	100,90	100,90	3000	
	5. Kelapa Sawit	5.546,43	2000	2000	5000	5.546,43	20.570,24	20.570,24	6.562,15	5.546,43	1.028,52	1.028,52	5000	
2	Produktivitas Hasil Pertanian (ton/ha)													
	1. Padi	40,00	20,00	36,52	40,00	40,00	20,00	36,52	40,00	40,00	20,00	36,52	40,00	
	2. Sayuran	765	1586	767	493	765	1586	767	493	765	1586	767	493	
	Buah-buahan	20168	26242	5876	6,341	20168	26242	5876	6,341	20168	26242	5876	6,341	
	4. Karet (Kg/Ha)	800	800	972,22	700	960,31	960,31	972,22	773,01	121,53	121,53	972,22	700	
	5. Kelapa Sawit (Kg/Ha)	1.683,14	1683	3.479,99	1100	2.582,86	2.582,86	3.479,99	1.106,53	206,76	206,76	3.479,99	1100	
No	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
3	Peningkatan Produksi Peternakan I. Populasi Ternak (ekor)													
	1. Sapi	2290	2406	2048	2293	2.290	2291	2048	2293	100,04	2406	2048	2293	
	2. Kerbau	24	50	14	25	16	57	14	25	66,67	50	14	25	
	3. Kambing	1826	1680	1775	1.721	1.826	1726	1775	1.721	100	1680	1775	1.721	
	4. Babi	24.528	11988	10651	2.594	0	8414	10651	2.594	97,75	11988	10651	2.594	
	5. Ayam Buras	137.122	193607	157.402	158.840	23.977	194590	157.402	158.840	141,81	194590	157.402	158.840	
	6. Ayam Broiler	2.398.162	4.619.184	3.240.000	4.803.500	4.752.775	4.619.184	184.300	4.803.500	198,18	4.713.450	184.300	4.803.500	
	7. Ayam Ras Layer	173640	177.706	182.300	70.100	152.800	182.326	3.240.000	70.100	88,00	177.706	3.240.000	70.100	
	8. Itik	7.109	7.278	9.784	11.995	6.920	7.465	9.784	11.995	97,34	7.278	9.784	11.995	
No	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	II. Produksi Produk Asal Ternak (ton)													
	1. Daging Sapi	1.339,789	1.275.990	95.977,4	384,257	1.090.392	1.090.392	95.977,4	384,257		85,45		384,257	
	2. Daging Kerbau	12.298	11.180	5.550	22,607	35.520	35.520	5.550	22,607	12.298	317,71	5.550	22,607	
	3. Daging Kambing	32.975	29.976	443,45	25,298	45.059	45.059	443,45	25,298	32.975	150,32	443,45	25,298	
	4. Daging Babi	418,307	380.280	8.745	25,712	354.173	354.173	8.745	25,712	418,307	93,13	8.745	25,712	
	5. Daging Ayam Buras	512,427	488.025	131.029	668,250	757.895	757.895	131.029	668,250	512,427	155,30	131.029	668,250	



4	6.	Daging Ayam Broiler	6.856	6.235.435	4418	8.334,914	6.858,980	9.124,253	4418	8.334,914	6.85660,81	146,3387,62	4418	8.334,914
	7.	Daging Itik	47.633	45.385	3.796	36,969	39.748	47.633	3.796	36,969			3.796	36,969
	8.	Telur	3.105	2.957.732	853.614	2.512,509		3.105,618	853.614	2.512,509	96,66	98,32	853.614	2.512,509
	9.	Ayam Ras					2.908,111				101,16	108,05		
		Telur												
	9.	Ayam Buras		3.105	55.115	190,211			55.115	190,211			55.115	190,211
			512,427				213,638	512,427			102,86	97,34		
	10.	Telur Itik	42.633	207,615	15.887	55,732	41.314	42.633	15.887	55,732			15.887	55,732
	5	Nilai Tukar Petani	118,53	121,60	118,57		118,53	121,60	118,57		118,53	121,60	118,57	
		Skor PPH	84,90	87,50	92,20	92,20	84,90	87,50	92,20	92,20	84,90	87,50	92,20	92,20

## 6. Bidang Perkebunan

Berdasarkan table 2.3.1 pencapaian kinerja pelayanan bidang perkebunan relative stabil. Keberhasilan pencapaian kinerja bidang perkebunan diantaranya didukung oleh program dan kegiatan yang sangat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini melalui Kelompok Tani dan Lembaga Pekebun lainnya. Program bantuan kepada masyarakat antara lain seperti bantuan bibit tanaman perkebunan dan bantuan pemeliharaan kebun masyarakat. Selain bantuan kepada masyarakat juga dilaksanakan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan kepada pekebun berupa kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

## 7. Bidang Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan tabel 2.3.1 tahun 2020 – 2024 menunjukkan hasil yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2024 mengalami penurunan. Aspek kuantitas konsumsi pangan/jumlah pangan yang dikonsumsi, mengalami penurunan pada tahun 2024 dimana Tingkat Konsumsi Energi (TKE) sebesar 90,14 % dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) sebesar 110,17 % bila dibandingkan dengan tahun 2023 Tingkat Konsumsi



Energi (TKE) sebesar 97,99 % dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) sebesar 121,40 %. Bila dilihat dari aspek kualitas, dari kelompok pangan Padi-padian, Umbi-umbian, Buah/Biji Berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan Buah masih belum memenuhi skor PPH yang ideal. Situasi ini terjadi karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam pengeluaran sehingga mengurangi konsumsi pangan yang berlebihan disamping itu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman bahan pangan serta masih rendahnya pengolahan bahan pangan lokal yang bervariasi sehingga berpengaruh terhadap selera masyarakat.

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama, ketersediaan pangan utama (beras dan jagung) mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2024 sebesar 96,64 %. Hal ini disebabkan akses jalan bagi kendaraan roda 4 dan moda transportasi air yang lancar serta adanya pasokan pangan dari daerah yang surplus dan adanya penambahan jumlah penduduk Kota Palangka Raya.

#### 2. Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama, Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan pada tahun 2024 sama seperti pada tahun 2023 yaitu sebesar 10 %. Hal ini disebabkan karena hampir semua Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya memiliki akses bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun serta moda transportasi air untuk pengangkutan bahan pangan dan jumlah tenaga Kesehatan serta sebaran tenaga Kesehatan yang semakin merata di tiap kelurahan.

#### 3. Tercapainya Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji $\geq 80$ %

Pengawasan keamanan pangan segar di Kota Palangka Raya dilakukan dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel pangan segar, penerbitan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan PD-UK juga pengawasan pangan segar asal tumbuhan peredaran yang dijual curah (tidak berkemas) di Pasar Pangan Segar Aman - Pasar Kahayan.

Penilaian capaian kinerja pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada Tahun 2024 berbeda dengan tahun yang lalu, dimana pada tahun 2024 dinilai berdasarkan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan segar dan jumlah registrasi yang dilaksanakan Pangan Segar Asal Tumbuhan PD-UK. Capaian kinerja total untuk indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan segar Kota Palangka Raya sebesar 98,24 %.

#### 8. Bidang Peternakan

Data capaian produksi Peternakan terdapat pada table 2.3.1 Secara umum populasi ternak mengalami kenaikan, populasi sapi potong pada tahun 2021 berjumlah 2.291 ekor dan pada tahun 2022 menurun menjadi 1.205 ekor, demikian juga untuk ternak kambing, babi, ayam buras dan itik. faktor yang mempengaruhi kondisi ini diantaranya karena adanya Pandemi covid-19 kota Palangka Raya, akan tetapi peluang usaha sektor Peternakan masih sangat terbuka dan menjanjikan sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk membudidayakan ternak dan sarana



prasarana yang tersedia. Hijauan Pakan Ternak untuk ruminansia sapi dan kambing tersedia di alam seperti rumput kumpai, sasendokan dan berbagai jenis rumput – rumputan maupun daun – daunan merupakan sumber pakan local yang banyak tersedia. Ketersediaan lahan untuk dimanfaatkan masih sangat luas bila dibandingkan lahan yang dimanfaatkan untuk pemukiman. Pembinaan, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi yang kian meningkat dalam kualitas dan kuantitas turut berkontribusi dalam perkembangan populasi serta keberlangsungan budidaya tersebut. Teknologi Inseminasi buatan yang diaplikasikan petugas teknis reproduksi yang terlatih memotivasi peternak sapi potong untuk memelihara dan mempertahankan sapi betinanya, sehingga sapi dapat beranak walaupun tanpa pejantan. Adanya peraturan yang melarang pemotongan sapi betina produktif merupakan satu bagian yang turut serta mengamankan populasi ternak sapi betina di Kota Palangka Raya.

Bagian Perunggasan khususnya ayam broiler mengalami peningkatan, ditandai dengan tumbuh kembangnya “ Kandang Close House “ yang akhir – akhir ini menjadi populer dan merupakan pilihan bagi penggerak dan pelaku penugasan, terdapat 10 kandang Close House dengan kapasitas antara 20.000 – 80.000 ekor dalam satu siklus pemeliharaan , belum lagi yang dalam tahap pembangunan . Kota Palangkaraya diperkirakan akan swasembada ayam broiler /potong dalam 2 tahun kedepan. Hal yang sama mulai terlihat pada ayam ras petelur yang mulai berkembang budidayanya yang dilakukan oleh masyarakat maupun investor. Namun demikian, produksi telur ayam ras yang ada masih belum dapat memenuhi kebutuhan telur konsumsi di Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya telah mencapai swasembada untuk ternak babi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahkan terjadi penyuplai ternak bibit dan ternak potong bagi kabupaten lain di wilayah Kalimantan Tengah. Namun demikian, tahun 2021 virus African Swine Fever (ASF) Demam Babi Afrika telah menyebabkan kematian hingga ribuan ekor dan mendatangkan kerugian besar pada peternak babi di Kota Palangka Raya. Sosialisasi, pembinaan dan upaya pencegahan dilakukan oleh Tim Kesehatan Hewan melalui pertemuan terhadap masyarakat dan kunjungan di lokasi yan terjangkit ASF. Bahwa pembangunan peternakan seyogianya dilakukan terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder yang terlibat

#### 9. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner kurun waktu tahun 2014 s.d 2021 seperti tercantum pada tabel dibawah ini. Dari data Tabel menunjukkan bahwa pemberian dosis vaksin rabies ada peningkatan dari tahun 2019 naik di tahun 2020 kemudian ada penurunan pada tahun 2021. Untuk Sampel Surveillance Avian Influenza (Sampel) terjadi Penurunan dari Tahun 2019 (347) sampel menjadi 100 tahun 2020, dan 0 (nol) pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan kurangnya ketersediaan anggaran dalam pemeriksaan sampel AI. Data Sampel produk asal Hewan juga mengalami penurunan dari 60 Sampel tahun 2019 turun 40 sampel 2020) dan 40 (2021), akan tetapi untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan.



Tabel 2.3.3 Realisasi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tahun								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemberian Vaksin Hewan (Dosis)	5.839	6.667	7.702	7.460	8.121	8.056	8.727	9.951	7587
2.	Surveillance Avian Influenza (Sampel)	500	500	550	347	0	0	0	0	0
3.	Pemeriksaan Sampel Produk Asal ternak (Sampel)	70	70	70	60	40	40	225	0	66

## 10. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Untuk lebih meningkatkan pengembangan usaha sektor pertanian, Peternakan dan Perkebunan diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan menguasai manajemen bisnis Pengembangan usaha Pertanian , Perkebunan, Peternakan tersebut mampu membangun usaha dari hulu sampai ke hilir yang berdaya saing dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan Lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dengan tenaga Fungsional Penyuluh yang andal dan berkualitas. Untuk Lebih meningkatkan Penyelenggaraan Penyuluhan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya juga melakukan pembinaan dan mendampingi kelompok – kelompok tani yang ada di Kota Palangka Raya. Program Penyuluhan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Pertanian Tahun 2024 yaitu Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Komoditas Padidan Swasembada Jagung Kalteng termasuk Kota Palangkaraya. Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat optimal sampai kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 16 mengenai Pos Penyuluhan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dimana Kota Palangka Raya baru memiliki 14 Pos Penyuluhan sedangkan idealnya 1 kelurahan memiliki 1 Pos Penyuluhan. Dalam pencapaian pelaksanaan target capaian pelayanan Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, anggaran menjadi salah satu faktor penting yang harus disiapkan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya tahun 2021 – 2024 seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4 Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE - (Rp.)			
	2021	2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>	208.506.250,00	208.506.250,00	110.000.000,-	110.000.000,-



<b>BELANJA DAERAH</b>	16.632.940.502,00	16.632.940.502,00	17.004.521.503,-	23.702.782.145,-
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
Belanja Pegawai			11.249.500.652,-	11.262.956.452,-
Belanja Barang dan Jasa			5.578.312.801,-	9.953.784.893,-
Belanja Operasional	15.317.947.093,00	15.317.947.093,00		10.003.784.893,-
Belanja Modal	1.314.993.409,00	1.314.993.409,00	127.008.050,-	2.436.040.800,-

Tabel 2.3.5 Realisasi Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024

URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE – (Rp.)			
	2021	2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>	172.545.000,00	137.430.000,00	103.245.000,00	110.000.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	16.390.627.659,00	17.760.562.617,00	17.004.521.503,00	23.702.782.145,00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Operasional	15.404.373.487,00	17.469.932.289,00	15.490.865.293,00	18.448.984.343.25,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
Belanja Pegawai		10.602.830.625,00	10.091.744.834,00	10.704.421.159,00
Belanja Barang dan Jasa		6.867.101.664,00	5.222.312.959,00	7.694.563.184,25
Belanja Hibah		0	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal		290.630.328,00	126.807.500,00	2.337.935.966,70,00

Tabel 2.3.6 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024

URAIAN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PELAYANAN TAHUN KE -			
	2021(%)	2022(%)	2023(%)	2024(%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>88,48</b>	<b>66,1</b>	<b>93,86</b>	<b>115,81</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>88,40</b>	<b>94</b>	<b>91,10</b>	<b>87,70</b>
<b>Belanja Operasional</b>				
Belanja Pegawai	93,54	97	89,71	95,04
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
Belanja Barang dan Jasa		92	93,62	77,30
Belanja Hibah		0	100	100
Belanja Modal		91	99,84	95,97





## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### A. Tantangan

1. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pertanian ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana berupa jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, pelayanan uji standar dan mutu, kebun untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas yang dibutuhkan petani dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.
2. Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/ bibit unggul dan bermutu, menumbuhkan kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/ hewan yang ramah lingkungan.
3. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.
4. Tantangan untuk mengembangkan kapasitas dan kelembagaan petani ke depan adalah bagaimana lembaga petani ini untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.
5. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kondisi masih lemahnya ketahanan pangan adalah bagaimana membangun kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Selain itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan, pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.
6. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kurangnya kuantitas dan kualitas produk pertanian yang belum mendukung berkembangnya agroindustri adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur transportasi hingga ke sentra produksi, mengembangkan agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang berskala kawasan.
7. Kualitas sumber daya manusia / Petani/masyarakat masih rendah
8. Tantangan terhadap keterbatasan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan jumlah dan kemampuan/ ketrampilan aparatur dan masyarakat.



9. Kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk berusaha di bidang Pertanian dan Kehutanan
  10. Kurangnya SDM Aparatur khususnya Penyuluh
  11. Harga pangan di tingkat Petani masih rendah
  12. Mobilitas dan akses jalan sebagai akses distribusi pangan belum memadai
  13. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang konsumsi Pangan yang bermutu, beragam, bergizi dan Aman
  14. Produksi Pangan Lokal masih rendah, masih banyak yang didatangkan dari luar daerah.
  15. Teknologi lanjutan Pengelolaan hasil pangan masih rendah
  16. Sarana dan prasarana DKPP belum memadai
  17. Tantangan untuk mengembangkan produksi, peningkatan populasi peternakan adalah bagaimana mengembangkan pembenihan/ pembibitan unggul dan bermutu melalui pengembangan teknologi reproduksi, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin, teknologi pakan ternak.
  18. Tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani yang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah adalah melalui penyediaan bahan baku ternak potong dengan mendatangkan pihak ketiga/ investor.
  19. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap kondisi masih lemahnya pengolahan hasil peternakan adalah bagaimana menganekaragamkan dan peningkatan kualitas produk pangan hewani dan produksi hasil olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
  20. Tantangan ke depan yang harus dihadapi terhadap tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing komoditas pertanian dengan karakteristik yang sesuai keinginan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi, baik pasar domestik, maupun pasar ekspor. Pengembangan daya saing dan ekspansi pasar komoditas ekspor tradisional harus lebih ditingkatkan, terutama pengembangan produk olahan. Selain itu, pengembangan komoditas dan produk baru yang memiliki permintaan pasar yang tinggi juga harus dirintis.
  21. Tantangan terhadap semakin berkembangnya penyakit hewan adalah bagaimana melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit secara berkesinambungan melalui tindakan-tindakan pengamanan penyakit, meningkatkan pengawasan peredaran vaksin dan obat hewan/ikan.
- B. Peluang
- Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya :
1. Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk.
  2. Tumbuhnya permintaan produk pangan organik di seluruh dunia sebagai akibat dari adanya tren baru masyarakat dunia yaitu gaya hidup sehat dengan slogan “Back to Nature”.



3. Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
5. Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan pertanian;
6. Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
7. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil kebun
8. Tersedia stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan Perkebunan
9. Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam
10. Tersedianya lahan tidur dan pekarangan masyarakat
11. Adanya komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan
12. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
13. Adanya Lumbung Pangan
14. Adanya Kelompok Tani dan Gapoktan
15. Terbentuknya Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan
16. Terbentuknya Pos – Pos Penyuluhan di beberapa kelurahan
17. Terbentuknya komisi penyuluhan Kota Palangka Raya
18. Tersedianya Teknologi Infomasi dan Komunikasi
19. Tingginya minat masyarakat berusaha di bidang peternakan. Besarnya permintaan pasar seiring dan perkembangan Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya yang semakin meningkat, memacu permintaan pasar terhadap produk sub sektor peternakan, sehingga peluang pasar terhadap produk komoditas ini masih sangat terbuka, dan produksi serta produktivitas hasil peternakan secara lokal semakin diminati oleh masyarakat kota Palangka Raya. Tingginya minat ini disebabkan masyarakat menyadari berusaha peternakan dapat menjadi salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, disamping usaha ini tidak perlu menyita waktu usaha lain.
20. Pengembangan potensi lahan pengembangan peternakan di Kota Palangka Raya. Di Kota Palangka Raya arah pengembangan kawasan peternakan dilakukan di beberapa lokasi. Kawasan peternakan difokuskan untuk pengembangan usaha ternak sapi potong yang berlokasi di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.
21. Semakin berkembangnya kelembagaan pembudidaya dan usaha peternakan. Di daerah produksi peternakan di Kota Palangka Raya dijumpai beberapa lembaga peternakan dari masyarakat. Kelembagaan tersebut dapat berupa usaha perorangan, persekutuan, perseroan dan koperasi. Untuk itu sebagai upaya pemerintah untuk memacu dan mengembangkan kelembagaan diperlukan pembinaan, pelatihan dan kurus singkat serta monitoring evaluasi perkembangan kelembagaan diwilayah Kota Palangka Raya.
22. Maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan;
23. Berkembangnya sentra perbibitan dan pembenihan ternak masyarakat.



### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PALANGKA RAYA**

Pembangunan pertanian kedepan masih tetap menfokuskan kepada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, pengembangan benih berbasis teknologi serta pusat pertumbuhan kawasan - kawasan sentra pengembangan dan pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Berbagai kendala yang masih menjadi faktor pembatas dan menjadi isu strategis dalam membangun pertanian kedepan juga menjadi perhatian yang harus diselesaikan, antara lain :

penataan kawasan sentra produksi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemampuan permodalan kelompok tani belum mantap, pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, pelaku usaha agribisnis dan sebagian aparat pertanian masih lemah, Kelembagaan Petani (Kelompok Tani dan Koperasi Tani) masih belum optimal, masih perlunya peningkatan kapasitas aparat pertanian dalam mengawal teknologi, demikian pula ketersediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi di tingkat petani masih belum memenuhi. Sarana dan prasarana Infrastruktur seperti jalan usaha tani dan jaringan pengairan di tingkat usaha tani masih belum memadai, ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) belum mencukupi kebutuhan, pola kemitraan antar kelompok tani dengan swasta/ investor serta Informasi pembangunan pertanian dan investasi masih sangat perlu dilakukan penataan kearah pengelolaan yang baik. Untuk mereduksi kondisi tersebut maka diperlukan akselerasi program dan kegiatan untuk mensinergikan dan terintegrasi yang diharapkan akan menjawab semua permasalahan dan upaya untuk membangun pertanian kedepan yang antara lain peningkatan produksi maupun produktivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di sentra produksi, meningkatkan kemampuan permodalan kelompok tani, meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Petani dan pelaku usaha agribisnis serta aparat, menjalin kerjasama/ bermitra dengan pemodal/ pengusaha maupun perbankan.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :



1. Diversifikasi yang belum berjalan secara progresif sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar.
2. Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan
3. Sistem Agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan dengan baik.
4. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana bidang Pertanian masih kurang dan relatif terbatas.
6. SDM Penyuluh pertanian masih belum optimal dalam mewujudkan profesionalisme seorang penyuluh yang kreatif, inovatif dan berwawasan global.
7. Masih kurangnya dukungan dan lemahnya kelembagaan penyuluh pertanian.
8. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi penyuluh.
9. Belum diterapkan sepenuhnya informasi, inovasi dan teknologi yang dapat mendukung petani dalam mengembangkan sistem pertanian

### 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

#### A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya

##### a. Visi

Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan , Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai falsafat Budaya Betang

##### b. Misi

Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri

#### B. Visi dan Misi Kementerian Pertanian

##### 1. Visi

Pertanian Yang Maju, Mandiri dan Modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

##### 2. Misi

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome



program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan kunci yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, terutama pendapatan perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC). Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul sejak Tahun 2020, maka hal ini perlu untuk diantisipasi dengan adanya perubahan fokus dan strategi agar sasaran pembangunan nasional tetap mencapai hasil sebagaimana yang telah ditetapkan. Pembangunan Pertanian dan Peternakan secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
4. Peningkatan kesejahteraan petani

Analisis Renstra K/L dan Renstra Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten/ Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten/ Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra K/L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten/ Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah atau Renstra K/L.



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan tengah tahun 2015 – 2035. Ruang Lingkup Penataan Ruang Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berada di Palangka Raya. Posisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45' Lintang Utara -3°30'Lintang Selatan dan 110°45 Bujur Timur -115°51 Bujur Timur. Terletak diantara tiga provinsi tetangga yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71 Ha atau 155.148,11 km<sup>2</sup>.

Dengan sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 m, merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, secara administratif wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan sehingga menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang dalam perkembangannya s/d tahun 2015 terdiri dari 136 Kecamatan dan 1.569 Desa/ Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1.	KATINGAN	13	161
2.	BARITO SELATAN	6	95
3.	BARITO TIMUR	10	103
4.	BARITO UTARA	9	103
5.	MURUNG RAYA	10	124
6.	KAPUAS	17	233
7.	PULANG PISAU	8	99
8.	GUNUNG MAS	12	127
9.	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185
10.	KOTAWARINGIN BARAT	6	94
11.	SERUYAN	10	100
12.	SUKAMARA	5	32
13.	LAMANDAU	8	83
14.	KOTA PALANGKA RAYA	5	30
KALIMANTAN TENGAH		<b>136</b>	<b>1.569</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 28 mengenai Kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas Non kawasan hutan seluas ±2.629.779 Ha dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi:



- a. Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas  $\pm 187.814,65$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas 178.572,86 Ha dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas  $\pm 64,001,81$  Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas  $\pm 37,385$  Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- d. Kawasan Tanah Adat merupakan ruang kelola masyarakat Adat program “Dayak Misik”, sejalan dengan program “Kalteng Besuh” yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 900.000 Ha;

2) Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, didasarkan pada tiga muatan strategis, yaitu lanskap berkelanjutan, ekonomi hijau dan strategi pembangunan rendah emisi (SPRE).

Berdasarkan prakiraan dampak 10 KRP prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 terhadap 6 isu strategis, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan masuk pada KRP 1 “Penuntasan pembangunan jalan lintas Kalimantan” yang mana isu strategis utamanya adalah isu alih fungsi lahan dan kebakaran hutan dan lahan. Jika memperhatikan lintasan jalan berdasarkan tutupan lahan, maka rencana lintasan tersebut pada umumnya melewati kawasan dengan aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat (83%). Namun, pembangunan jalan seringkali diikuti dengan pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan, salah satunya adalah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan dan persiapan lahan untuk tanam adalah dengan cara tebas-bakar, dan dengan demikian akan meningkatkan kebakaran lahan dan hutan apabila ladang pertanian berdekatan dengan kawasan hutan. Hal ini diperkirakan akan mengancam kawasan bernilai konservasi tinggi. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat pembukaan hutan dan pembersihan lahan menyebabkan lanskap menjadi terbuka sehingga makin memperbesar kemungkinan terjadinya erosi tanah, dan dengan demikian, meningkatkan laju sedimentasi sungai. Adapun adaptasi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengembangan pertanian tanpa bakar, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, sistem pertanian berkontur). Rekomendasi untuk KRP 1, antara lain : 1) Perlu penguatan kapasitas





petani dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) termasuk insentif pendorongnya; 2) Perlu panduan teknik konservasi tanah dan air menggunakan sistem kontur dan terasering; 3) Perlu penyusunan panduan praktis untuk penyiapan lahan tanpa bakar dan mekanisme dini pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Selain KRP 1 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga masuk pada KRP 6 “Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan pada lahan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, dan wilayah adat ditentukan melalui peta usulan kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan PIPPIB, Gambut Dalam, PIAPS, wilayah adat di provinsi Kalimantan tengah. Meskipun pencapaian produksi 853.000 ton tahun 2014 memberikan surplus padi, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berobsesi untuk mencapai produksi 1 juta ton. Untuk mencapai obsesi tersebut, maka dilakukan intensifikasi produksi padi khususnya di sentra-sentra produksi padi di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur. Disamping program intensifikasi, direncanakan pula perluasan areal tanam (ekstensifikasi) khususnya pada padi sawah.

KRP 6 yang dilakukan melalui cara ekstensifikasi perlu mendapat perhatian mengingat kegiatan pembukaan lahan seringkali dilakukan dengan cara bakar. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai hampir 577.559 ha pada umumnya berada di kawasan lahan gambut. Ekstensifikasi lahan padi sawah di daerah rawa gambut pasang surut (tidal peat swamp) perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Pembuatan saluran irigasi di daerah rawa gambut pasang surut, disamping berfungsi sebagai saluran pengairan, juga berfungsi sebagai saluran drainase. Pada musim kemarau, pada saat muka air tanah sangat rendah, maka saluran drainase ini akan mendorong keluarnya air dari lahan gambut sehingga menyebabkan permukaan tanah gambut menjadi cepat kering. Kondisi ini akan meningkatkan peluang terjadinya kebakaran lahan gambut. Pembuatan saluran irigasi/drainase pada kawasan persawahan rawa gambut pasang surut juga membuka akses masyarakat terhadap kawasan tersebut.

Adapun Mitigasi dari KRP 6 yakni Penetapan konservasi kawasan hutan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tetap harus memperhatikan kawasan bernilai konservasi tinggi (kawasan NKT) dan area kelola masyarakat lokal/adat. Sedangkan untuk adaptasi nya dengan pemberian insentif kepada petani tanaman pangan khususnya padi sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan. Rekomendasi untuk KRP 6 antara lain: 1) Tidak melakukan konservasi kawasan hutan menjadi lahan perlindungan lahan pertanian pangan di kawasan NKT dan area kelola masyarakat lokal/adat; 2) Penyediaan subsidi untuk pengadaan sarana produksi padi dan fasilitasi pemasaran hasil panen kepada petani; 3) Peningkatan produktivitas padi khususnya padi gogo (padi lahan kering) dengan penerapan teknik budidaya yang baik (good agricultural practices); 4) Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan pada kawasan NKT rendah.

Dalam rangka mewujudkan Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE) di Provinsi Kalimantan Tengah, dikembangkan kriteria khusus untuk mewujudkan SPRE yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan penyerapan emisi karbon (peningkatan stok karbon) dengan cara meningkatkan tutupan lahan yang akan terjadi 20 tahun dengan mempertimbangkan 4 kriteria



khusus salah satunya yaitu wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Di Provinsi Kalimantan Tengah luas kawasan gambut dalam (lebih dari 3 meter) tersebut adalah seluas 1.675.402 ha. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai luas gambut dalam yang terbesar, yaitu 407.834 ha. Selanjutnya kabupaten Katingan mempunyai luas gambut dalam seluas 287.168 ha. Kebijakan menjadikan gambut dalam menjadi kawasan lindungan setempat seluas 1.675.402 ha akan berpotensi menyimpan karbon sebesar 235.199.733 ton karbon.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang pertanian dan peternakan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

KLHS untuk bidang pertanian dan peternakan, merupakan sebuah kajian yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta dampaknya bagi lingkungan di masyarakat, sehingga RTRW bidang pertanian dan peternakan yang didasarkan pada KLHS, akan menjadi kawasan pertanian dan peternakan yang didasari oleh kajian dan telaah yang mendukung kelestarian lingkungan hidup serta kelayakan, sesuai dengan analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan Pertanian dan Peternakan di Kalimantan tengah, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

- a. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Peternakan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian dan Peternakan secara Regulasi.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan.
- c. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu Kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan Pertanian dan Peternakan yang ideal, disebabkan oleh faktor kondisi lahan yang tidak optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis, lahan terlantar.
- d. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan Pertanian dan Peternakan, sehingga masih menimbulkan konflik di masyarakat, disebabkan tidak jelasnya batas-batas kawasan, baik antara kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat serta kawasan peternakan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi pelayanan Pembangunan Pertanian dan Peternakan ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

1. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi.
2. Perlu adanya pengaturan yang mengatur batas-batas kawasan dan tata guna lahan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.



3. Pengembangan kawasan pertanian unggulan yang terintegrasi (agropolitan) menjadi kawasan yang produktif dan menghasilkan dari sisi ekonomis.
4. Optimalisasi lahan dan cetak sawah, dalam rangka perluasan kawasan pertanian dan Peternakan, dan peningkatan produksi dan produktivitas.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Palangka Raya, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain:

- a. Belum tertatanya kawasan pengembangan yang telah disesuaikan dengan tata ruang wilayah, dikarenakan belum terbitnya Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkini, mengharuskan arahan fungsi kawasan tetap mengacu kepada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan kawasan.
- b. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan
- c. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu kawasan yang ideal untuk pertanian yang disebabkan oleh factor kondisi lahan yang belum optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis dan lahan terlantar.
- d. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan pembangunan pertanian, sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat disebabkan tidak jelasnya batas-batas kawasan, baik kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat.
- e. Mempertimbangkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya terdiri atas lahan gambut, maka alokasi ruang untuk pertanian, perikanan dan peternakan harus dilakukan secara hati-hati karena aktivitas pembukaan lahan gambut akan meningkatkan emisi karbon dan pada saan bersamaan mengurangi fungsi areal gambut sebagai tempat penampungan air hujan (Water retention), apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan bencana banjir.

Beberapa faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan, yaitu

- a. Regulasi yang mengatur tata ruang wilayah, sehingga adanya tata ruang yang terpadu dan serasi
- b. Pelaksanaan program-program terpadu di Kota Palangka Raya
- c. Pengembangan kawasan yang terintegrasi agropolitan, P2IUSP (Penembangan Pembibitan dan Inkubator Usaha Sapi Potong) dan minapolitan menjadi kawasan yang produktif dan ekonomis.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.

Kegiatan bidang Ketahanan Pangan yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung beras dan bahan produk lainnya pada musim-musim tertentu dan disalurkan pada saat rawan pangan.



Pembangunan lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah rawan pangan. Oleh karena itu lumbung pangan dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/desa. Target pembangunan lumbung pangan sebanyak 5 lumbung pangan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014 s/d 2018. Penentuan lokasi lumbung dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Membuka surat/mengirim surat ke kecamatan (camat) sebagai calon lokasi lumbung, di mana isi surat dimaksud agar pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan dibangun.
2. Dari pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya menugaskan staf untuk turun langsung ke lapangan dalam rangka menghimpun informasi dari semua pihak terkait sehubungan dengan akan dibangun lumbung pangan masyarakat desa di wilayah ini. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Dengan melalui tahapan-tahapan tersebut sehingga apabila dibangun lumbung pangan masyarakat tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak perekonomian. Lahan, perairan umum, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Saat ini disadari bahwa pembangunan pertanian tidak saja bertumpu di satu kawasan tetapi juga diperlukan integrasi dengan kawasan dan dukungan sarana serta prasarana yang memadai. Struktur perekonomian wilayah merupakan faktor dasar yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi dan potensi suatu wilayah dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Berangkat dari kondisi tersebut perlu disusun sebuah kerangka dasar pembangunan pertanian yang kokoh dan tangguh, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas 'keberlanjutan' yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi.

Konsep pertanian yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan perencanaan wilayah yang berbasis sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah tertentu. Konsep perencanaan mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah karena perencanaan merupakan suatu proses persiapan secara sistematis dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan yang mencakup siapa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki agar pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



Secara umum bahwa sumber daya pertanian adalah potensi yang strategis untuk wilayah Kota Palangka Raya dan memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kota Palangka Raya, yang diindikasikan sektor pertanian dalam memberikan peranan dalam pembangunan daerah dan perekonomian yang harapannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk dapat merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Peranan pertanian/agribisnis tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, yaitu yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya produksi dan produktivitas mutu perkebunan.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
3. Masih lemahnya kelembagaan dan sumberdaya petani.
4. Perlindungan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Selanjutnya ditentukan juga isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi bidang Perkebunan Kota Palangka Raya dari faktor-faktor eksternal lainnya, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Isu-isu strategis dalam pembangunan Pertanian di Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian,.
- b. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local.
- c. Pengembangan kelembagaan pertanian.
- d. Pengembangan kapasitas SDM di bidang Pertanian, .
- e. Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di bidang pertanian.
- g. Ketidakmerataan kesejahteraan dikarenakan pertanian kurang mendapatkan perhatian untuk investasi.
- h. Kurang adanya keterkaitan antara sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Kantor Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya di masa datang suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dalam Peternakan di Kota Palangka Raya, antara lain sebagai berikut :



1. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur peternakan
2. Peningkatan penerapan teknologi spesifik local dan sistem pertanian berbasis konservasi.
3. Pengembangan kelembagaan peternakan.
4. Pengembangan kapasitas SDM di bidang peternakan
5. Penuluran dan penyebaran penyakit hewan strategis/eksotik
6. Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
7. Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan, produksi dan pasca panen di bidang peternakan.

Adapun isu-isu strategis pada bidang, Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- A. Strategis yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain dengan :
  - a. Mengsinkronkan dan mengintegrasikan program kegiatan ketahanan pangan yang meliputi sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman pangan.
  - b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
  - c. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
  - d. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.
- B. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman antara lain dengan:
  1. Meningkatkan pemberdayaan aparatur ketahanan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan P-LDPM dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.
  2. Meningkatkan fasilitasi petugas ketahanan pangan dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas 3B dan aman, terutama yang berbasis potensi lokal.
  3. Menjaga stabilitas harga pangan.
  4. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang antara lain :
  5. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan operator.
  6. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal.
  7. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
  8. Memfasilitasi permodalan petani.
  9. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.
- C. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman antara lain dengan :
  1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif.
  2. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui produk pangan dalam negeri/pangan lokal.



3. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai media.
4. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
5. Membangun cadangan pangan masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu :

1. Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu;
2. Pangan merupakan basis bagi pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, baik dalam arti biologis maupun intelektual;
3. Pemantapan kebutuhan pangan merupakan basis pembangunan ekonomi, dan kebutuhan nasional bagi suatu negara yang berdaulat.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 – 2023. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel lampiran.

##### A. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah :

Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis

##### B. Tujuan Perangkat Daerah :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Daerah

Tujuan dari pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut :

##### ➤ Bidang Urusan Pertanian

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pangan dan Hortikultura.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian.
3. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani.

Adapun Sasaran pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya yaitu “Swasembada Tanaman Pangan dan Hortikultura Khusus Komoditas Sayur-sayuran”.

##### ➤ Bidang Urusan Perkebunan

1. Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menjamin kesejahteraan hidupnya melalui usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.

Sasaran : Terlaksananya pelatihan/sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat serta pementapan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang lestari

2. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan.

Tujuan : meningkatkan produktifitas lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha di sektor perkebunan.

Sasaran : terlaksananya pengembangan usaha sektor perkebunan oleh masyarakat melalui pemberian bantuan bibit tanaman, perlengkapan kerja dan pemeliharaan kebun serta fasilitasi investasi sektor perkebunan.





➤ Bidang Urusan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Tujuan dari pembangunan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam Menganalisis dan Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Ketersediaan Pangan.
2. Mengembangkan sistem koordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan upaya pengembangan ketahanan pangan
3. Memfasilitasi masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bertumpu pada sumber daya lokal.

Sasaran dari Program Pembangunan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Makro

- a. Ketersediaan energi 2663 kkal/kap./hari dan protein 87,84 gram/kap/hari.
- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88 kkal/kapita/hari.
- c. Menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Palangka Raya 1(satu) % pertahun, sesuai Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2006.
- d. Meningkatkan produksi pangan sehingga tidak terjadi rawan pangan.

2. Sasaran Mikro

- a. Pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 6 Kelurahan inti, dan 3 Kelurahan Replikasi
- b. Penanganan kerawanan pangan di kecamatan/kelurahan yang terpencil sebanyak 9 Kelurahan, dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sebanyak 5 Kelurahan 1 Kecamatan.
- c. Neraca bahan makanan dan PPH Ketersediaan Pangan 1 kegiatan.
- d. Percepatan diversifikasi konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
- e. Analisis pola konsumsi pangan sebanyak 1 kegiatan
- f. Pengembangan lahan pekarangan sebanyak 1 kegiatan
- g. Keamanan dan mutu pangan sebanyak 1 kegiatan

Tujuan dan sasaran terdapat pada Tabel (T-C.25).



## **BAB. V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, tujuan serta pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tersebut akan ditempuh melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan pertanian di Kota Palangka Raya dan kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pada 3 (Tiga ) tahun ke depan. Strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya merupakan suatu cara pandang untuk menentukan tindakan masa depan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Palangka Raya. Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan terjemahan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi dan arah kebijakan erat kaitannya dengan ke mana arah Kota Palangka Raya akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan hasil analisis situasi dan identifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap substansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut dapat digambarkan pada tabel Lampiran (T-C.26)



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023 yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber dana untuk melaksanakan program/kegiatan, baik pada tahun rencana maupun prakiraan maju. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi.

Agar diperoleh hasil yang lebih baik, terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam hal ini terfokus pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengecekan apakah indikator kerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;



- b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat yang akan dipilih;
  - c. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya
  - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda) yang dilakukan sebagai berikut:
- a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPd, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
  - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
  - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPd, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
  - d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPd yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2023- 2026 pada lampiran renja ini tabel 1.

Penyajian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023, SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya terdiri dari 10 program dan 24 kegiatan. Adapun pendukung dan penunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan sumber dana yang berasal dari APBD dan DAK. Sumber Dana yang direncanakan pada tahun Anggaran 2023 oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber dana dari APBD tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Daerah: Rp. 23.702.782.145,-

dengan rincian sebagai berikut :

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Belanja Pegawai         | : Rp. 11.262.956.452,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | : Rp. 9.953.784.893,-  |
| - Belanja Hibah           | : Rp. 50.000.000,-     |



- Belanja Modal : Rp. 2.436.040.800,-

Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan pembangunan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **Program dan Rencana Kegiatan**

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan merupakan penjabaran strategis dari Visi dan Misi pembangunan Kota Palangka Raya. Secara garis besar, untuk melaksanakan Visi dan Misi, maka disusun program unggulan yang sumber dananya bersumber dari APBD dan DAK Kota Palangka Raya sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

#### **3. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **4. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

#### **5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten /Kota
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak, Dalam Daerah Kabupaten / Kota
5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain



**6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Pembangunan Prasarana Pertanian

**7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

**8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

**9. Program Perizinan Usaha Pertanian**

1. Penerbitan Ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

**10. Program Penyuluhan Pertanian**

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



## **BAB VII.**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja dinas berkenaan. Indikator kinerja dinas mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya tahun 2024- 2026 disajikan pada tabel Lampiran (T-C.26).



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan implementasi yang konsisten dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Palangka Raya (RPJMD 2024-2026).

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 -2026 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) mulai tahun 2024 hingga 2026

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) yang merupakan program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan Rencana Strategis ini.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu masyarakat, pelaku usaha, eksekutif maupun legislatif, dan yang terpenting adalah peran aktif dari seluruh aparatur / pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.





Tabel T-C. 25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun ke-			
				2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian	Rata Pertumbuhan Pola Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)	18.5%	19%	19.50%	20%
			2.Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	22.70%	23.20%	23.70%	
			3.Rata- Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	13.00%	13.5%	14.00%	14.50%
		2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79.65	79.75	79.50	
			1.Ketersediaan Pangan Utama	92.40%	92.50%	92.70%	
			2. Skor PPH	91.2	91.9	95.0	
			3.Persentase Daerah(Kelurahan) Rawan Pangan	10%	10%	10%	
			4.Pengawasan Keamanan Pangan	80%	80%	80%	

Tabel T.C-26

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan , Jasa dan Wisata yang Berkualitas, tertata dan berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Filsafat Budaya Betang

Misi : Mewujudkan Pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan Investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensimasyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Daerah	1. Meningkatkan Pertumbuhan Produksi Pertanian	<p>- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura:</p> <p>Pengembangan Tanaman Padi di Sawah tadah hujan, untuk mengantisipasi bencana banjir pada lahan sawah rawa lebak, kita sudah menanam padi di Lahan sawah tadah hujan namun demikian kita harus menyiapkan mesin sedot air untuk pengairan saat musim kering</p> <p>Menanam Padi dengan varietas unggul berumur genjah sehingga dalam perawatan / pemeliharaannya tidak memakan waktu yang lama / cepat panen</p> <p>Menanam Tanaman pangan alternatif baru sebagai langkah - langkah peningkatan pangan dan juga dalam rangka penganeekaragaman pangan serta untuk meningkatkan produktifitas lahan</p> <p>- Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat dan Veteriner:</p> <p>1. Optimalisasi Pengawasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Ternak dan Penyakit</p> <p>2. Optimalisasi Pengawasan Keamanan Produk Pangan asal Hewan/Ternak</p> <p>- Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :</p> <p>1. Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dan hijauan pakan Ternak bermutu secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan Bibit Ternak di Kota Palangka Raya</p> <p>2. Penyediaan Semen Cair/beku secara cepat , tepat waktu dan jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan Daerah dan Mengurangi ketergantungan ternak potong atau ternak bibit dari luar daerah</p> <p>4. Pengembangan Agrowisata sebagai salah satu kunjungan wisata</p> <p>5. Penyediaan Pusat kajian teknologi Peternakan , Tempat pelatihan magang, penelitian dan sekolah lapang bagi Peternak /Kelompok tani ternak dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Bidang Pembibitan Ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Inseminasi Buatan (IB)</p> <p>- Bidang Perkebunan :</p> <p>1. Meningkatkan Intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman pangan perkebunan</p> <p>2. Mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal</p> <p>3. Mempertahankan Existing lahan historis Perkebunan</p> <p>4. Meningkatkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan</p> <p>5. Mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan</p> <p>6. Meningkatkan Pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan</p>	<p>Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan untuk ketahanan pangan</p> <p>1. Peningkatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Teknis</p> <p>3. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan serta pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner</p> <p>5. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas Skala kecil (RPUSK)</p> <p>6. Penerapan Sistem Jaminan mutu oroduk hasil olahan Hewan</p> <p>7. Peningkatan Peluang Investasi di Bidang Peternakan</p> <p>1. Peningkatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih dan Bibit sesuai dengan standar</p> <p>3. Penguatan Wilayah Sumber Bibit dan Kelembagaan usaha Perbibitan</p> <p>4. Pencegahan Pematangan Sapi Betina Produktif</p> <p>5. Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Teknis</p> <p>6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>7. Pembinaan dan Pengawasan serta pemanfaatan pakan Lokal dan Limbah Pertanian</p> <p>Meningkatkan Produksi , Produktifitas Mutu tanaman Perkebunan berkelanjutan melalui Pengembangan Komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan Usaha, Investasi Usaha Perkebunan sesuai dengan Kaidah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan dukungan Pengembangan System Informasi Managemen Perkebunan</p>

		<p>7. Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu</p> <p>- Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan :</p> <p>1. Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>2. Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi Pertanian</p> <p>3. Meningkatkan Kapasitas sumberdaya manusia</p> <p>4. Mengintensifkan koordinasi baik dengan instansi vertikal dan instansi horizontal untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih maksimal.</p>	<p>1. Koordinasi Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Provinsi Kalteng dan Kementerian Pertanian RI</p> <p>2. Mendukung Program dan Kegiatan teknis kebijakan daerah pembangunan Pertanian Kota Palangka Raya</p> <p>3. Mendukung Kebijakan Teknis Kelembagaan Petani dengan saling berkoordinasi intensif, juga berkolaborasi dengan lembaga instansi lainnya di Kota Palangka Raya</p>
	2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan Keragaman Konsumsi Pangan Utama</p> <p>a. Melaksanakan Stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk memenuhi 3 aspek Ketahanan Pangan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. dengan melakukan pencatatan dan pelaporan harga pangan pokok Kota Palangka Raya, dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah</p>	<p>- Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Aspek Ketersediaan Pangan, di fokuskan pada :</p> <p>a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam berbasis potensi Sumberdaya Lokal</p> <p>b. Memantapkan Penanganan Kerawanan Pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan</p> <p>- Dalam aspek Keterjangkauan Pangan difokuskan pada :</p> <p>a. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>b. Pengelolaan Cadangan Pangan</p> <p>sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan di fokuskan pada :</p> <p>a. Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal</p> <p>b. Pengawasan Mutu dan keamanan Pangan Segar</p>
		<p>b. Kualitas konsumsi pangan masyarakat ditunjukkan dengan angka skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Pola konsumsi masyarakat yang BZSA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) masih perlu ditingkatkan sehingga perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan terus menerus melakukan sosialisasi pangan beragam bergizi, seimbang dan aman (BZSA), mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal melalui lomba cipta menu, serta melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk menganeekaragamkan sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain</p>	
		<p>2. Menurunkan Prosentase daerah rawan pangan :</p> <p>Potensi daerah rentan rawan pangan di Kota Palangka Raya dapat diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadi bencana alam. Penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta adanya sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan.</p>	
		<p>3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan</p> <p>Menyelenggarakan Cadangan pangan Pemerintah Daerah karena hal ini sangat penting untuk dilaksanakan. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masatanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.</p>	
		<p>4. Meningkatkan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan Meningkatkan Prosentase Pangan Segar yang diuji</p> <p>Dilakukan lebih banya pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan karena Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan segar yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi dan fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan di masyarakat/ pelaku usaha. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun pelaku usaha terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani.</p>	

No.	INDIKATOR	Capaian 2023	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	2027	
1	Indeks Ketahanan Pangan	79.61	79.65	79.65	79.75	79.50		79.50
2	Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	18.0%	18.5%	18.5%	19,0 %	19.5%	20.0%	20.0%
3	Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	22.70 %	22.70%	22.70%	23.20 %	23.70 %		23.70 %
4	Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	12.5%	13,0 %	13,0 %	13.5%	14,0 %	14.5%	14.0 %

RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026															
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		-	-	316.204.000	-	316.204.000	-	316.204.000	-	948.612.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		-	-	132.280.000	-	132.280.000	-	132.280.000	-	396.840.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	90,6 Laporan	91,6 Laporan	42.800.000	95 Laporan	42.800.000	98,4 Laporan	42.800.000	95 Laporan	128.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	90,6 Laporan	91,6 Laporan	31.680.000	95 Laporan	31.680.000	98,4 Laporan	31.680.000	95 Laporan	95.040.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	90,6 Laporan	91,6 Laporan	-	95 Laporan	-	98,4 Laporan	-	95 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	42.800.000	95 Dokumen	42.800.000	98,4 Dokumen	42.800.000	95 Dokumen	128.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	90,6 Unit	91,6 Unit	15.000.000	95 Unit	15.000.000	98,4 Unit	15.000.000	95 Unit	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	90,6 Unit	91,6 Unit	-	95 Unit	-	98,4 Unit	-	95 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		-	-	85.500.000	-	85.500.000	-	85.500.000	-	256.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	90,6 Laporan	91,6 Laporan	-	95 Laporan	-	98,4 Laporan	-	95 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	42.800.000	95 Dokumen	42.800.000	98,4 Dokumen	42.800.000	95 Dokumen	128.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	90,6 Ton	91,6 Ton	42.700.000	95 Ton	42.700.000	98,4 Ton	42.700.000	95 Ton	128.100.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	90,6 Ton	91,6 Ton	-	95 Ton	-	98,4 Ton	-	95 Ton	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		-	-	98.424.000	-	98.424.000	-	98.424.000	-	295.272.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	31.680.000	1 Dokumen	31.680.000	1 Dokumen	31.680.000	3 Dokumen	95.040.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	12 Laporan	66.744.000	12 Laporan	66.744.000	12 Laporan	66.744.000	36 Laporan	200.232.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	15.000.000	95 Dokumen	15.000.000	98,4 Dokumen	15.000.000	95 Dokumen	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	36 Laporan	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	12 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		-	-	63.360.000	-	63.360.000	-	63.360.000	-	190.080.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	63.360.000	-	63.360.000	-	63.360.000	-	190.080.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	-	95 Dokumen	-	98,4 Dokumen	-	95 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90,6 Sertifikat	91,6 Sertifikat	-	95 Sertifikat	-	98,4 Sertifikat	-	95 Sertifikat	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	-	95 Dokumen	-	98,4 Dokumen	-	95 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	31.680.000	95 Dokumen	31.680.000	98,4 Dokumen	31.680.000	95 Dokumen	95.040.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	90,6 Dokumen	91,6 Dokumen	31.680.000	95 Dokumen	31.680.000	98,4 Dokumen	31.680.000	95 Dokumen	95.040.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	13.492.535.133	-	13.492.535.133	-	13.492.535.133	-	40.477.605.399	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	138.027.381	-	138.027.381	-	138.027.381	-	414.082.143	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 % Dokumen	80% Dokumen	36.359.190	85% Dokumen	36.359.190	90% Dokumen	36.359.190	-	109.077.570	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80 % Dokumen	80% Dokumen	12.033.000	85% Dokumen	12.033.000	90% Dokumen	12.033.000	-	36.099.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80 % Dokumen	80% Dokumen	12.082.900	85% Dokumen	12.082.900	90% Dokumen	12.082.900	-	36.248.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	80 % Dokumen	80% Dokumen	12.025.600	85% Dokumen	12.025.600	90 Dokumen	12.025.600	90 Dokumen	36.076.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	80 % Dokumen	80% Dokumen	12.096.600	85% Dokumen	12.096.600	90% Dokumen	12.096.600	-	36.289.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 % Laporan	80% Laporan	36.680.091	80% Laporan	36.680.091	90% Laporan	36.680.091	-	110.040.273	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 % Laporan	80% Laporan	16.750.000	85% Laporan	16.750.000	90% Laporan	16.750.000	-	50.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	11.030.620.452	-	11.030.620.452	-	11.030.620.452	-	33.091.861.356	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80% Orang/bulan	11.000.000.452	85% Orang/bulan	11.000.000.452	90% Orang/bulan	11.000.000.452	-	33.000.001.356	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80% Dokumen	80% Dokumen	-	85% Dokumen	-	90% Dokumen	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80% Dokumen	80% Dokumen	-	85% Dokumen	-	90% Dokumen	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80% Dokumen	80% Dokumen	8.620.000	85% Dokumen	8.620.000	90% Dokumen	8.620.000	-	25.860.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80% Laporan	80% Laporan	10.000.000	85% Laporan	10.000.000	90% Laporan	10.000.000	-	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	80% Dokumen	80% Dokumen	-	85% Dokumen	-	90% Dokumen	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80% Laporan	80% Laporan	-	85% Laporan	-	90% Laporan	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80% Dokumen	80% Dokumen	12.000.000	85% Dokumen	12.000.000	90% Dokumen	12.000.000	-	36.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	70.000.000	-	70.000.000	-	70.000.000	-	210.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80% Unit	80% Unit	-	85% Unit	-	90% Unit	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80% Paket	80% Paket	-	85% Paket	-	90% Paket	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80% Dokumen	80% Dokumen	-	85% Dokumen	-	90% Dokumen	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80% Dokumen	80% Dokumen	-	85% Dokumen	-	90% Dokumen	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80% Orang	80% Orang	70.000.000	85% Orang	70.000.000	90% Orang	70.000.000	-	210.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80% Orang	80% Orang	-	85% Orang	-	90% Orang	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	441.445.200	-	441.445.200	-	441.445.200	-	1.324.335.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80% Paket	80% Paket	15.000.000	85% Paket	15.000.000	90% Paket	15.000.000	-	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.065.200	1 Paket	150.065.200	1 Paket	150.065.200	3 Paket	450.195.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80% Paket	80% Paket	7.000.000	85% Paket	7.000.000	90% Paket	7.000.000	-	21.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	90% Paket	-	2 Paket	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	40.000.000	36 Dokumen	40.000.000	36 Dokumen	40.000.000	108 Dokumen	120.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	3 Paket	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraaRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	209.380.000	60 Laporan	209.380.000	60 Laporan	209.380.000	180 Laporan	628.140.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	15 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	15 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-	30 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	9 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	15 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.119.348.000	-	1.119.348.000	-	1.119.348.000	-	3.358.044.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	80% Laporan	15.000.000	85% Laporan	15.000.000	90% Laporan	15.000.000	-	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	219.000.000	12 Laporan	219.000.000	12 Laporan	219.000.000	36 Laporan	657.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	885.348.000	12 Laporan	885.348.000	12 Laporan	885.348.000	36 Laporan	2.656.044.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	693.094.100	-	693.094.100	-	693.094.100	-	2.079.282.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	300.012.700	10 Unit	300.012.700	10 Unit	300.012.700	30 Unit	900.038.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	74.998.900	10 Unit	74.998.900	10 Unit	74.998.900	30 Unit	224.996.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	20.000.000	30 Unit	20.000.000	30 Unit	20.000.000	90 Unit	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	298.082.500	6 Unit	298.082.500	6 Unit	298.082.500	18 Unit	894.247.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		-	-	908.287.574	-	908.287.574	-	908.287.574	-	2.724.862.722	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-	-	377.169.100	-	377.169.100	-	377.169.100	-	1.131.507.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	125.931.500	12 Laporan	125.931.500	12 Laporan	125.931.500	36 Laporan	377.794.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	251.237.600	12 Laporan	251.237.600	12 Laporan	251.237.600	36 Laporan	753.712.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	63.500.000	-	63.500.000	-	63.500.000	-	190.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	80 % VUB	80% VUB	-	85% VUB	-	90% VUB	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen	63.500.000	6 Dokumen	63.500.000	6 Dokumen	63.500.000	18 Dokumen	190.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	18 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	85.006.400	-	85.006.400	-	85.006.400	-	255.019.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	12 Laporan	12 Laporan	85.006.400	12 Laporan	85.006.400	12 Laporan	85.006.400	36 Laporan	255.019.200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.04.02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	20 Kasus	25 Kasus	-	30 Kasus	-	35 Kasus	-	90 Kasus	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	367.636.074	-	367.636.074	-	367.636.074	-	1.102.908.222	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	100 Ekor	100 Ekor	-	100 Ekor	-	100 Ekor	-	300 Ekor	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05.02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	100 Ekor	100 Ekor	52.742.274	100 Ekor	52.742.274	100 Ekor	52.742.274	300 Ekor	158.226.822	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	5 Ton	5 Ton	-	5 Ton	-	5 Ton	-	15 Ton	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	5 Ton	7 Ton	299.894.000	9 Ton	299.894.000	10 Ton	299.894.000	26 Ton	899.682.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan	14.999.800	12 Laporan	14.999.800	12 Laporan	14.999.800	36 Laporan	44.999.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	14.976.000	-	14.976.000	-	14.976.000	-	44.928.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 Ekor	150 Ekor	14.976.000	200 Ekor	14.976.000	250 Ekor	14.976.000	600 Ekor	44.928.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		-	-	292.033.200	-	292.033.200	-	292.033.200	-	876.099.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		-	-	86.420.000	-	86.420.000	-	86.420.000	-	259.260.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000	15 Dokumen	105.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	5 Dokumen	5 Dokumen	21.420.000	5 Dokumen	21.420.000	5 Dokumen	21.420.000	15 Dokumen	64.260.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	36 Laporan	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-	205.613.200	-	205.613.200	-	205.613.200	-	616.839.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	2 Unit	-	3 Unit	-	4 Unit	-	9 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000	9 Unit	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2 Unit	-	3 Unit	-	4 Unit	-	9 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	77.613.200	1 Unit	77.613.200	1 Unit	77.613.200	3 Unit	232.839.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	15 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	8 Unit	118.000.000	8 Unit	118.000.000	8 Unit	118.000.000	24 Unit	354.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		-	-	642.527.300	-	642.527.300	-	642.527.300	-	1.927.581.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		-	-	567.584.300	-	567.584.300	-	567.584.300	-	1.702.752.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	192.850.300	12 Laporan	192.850.300	12 Laporan	192.850.300	36 Laporan	578.550.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	150.635.000	12 Laporan	150.635.000	12 Laporan	150.635.000	36 Laporan	451.905.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	224.099.000	12 Laporan	224.099.000	12 Laporan	224.099.000	36 Laporan	672.297.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	39.920.000	-	39.920.000	-	39.920.000	-	119.760.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	39.920.000	12 Laporan	39.920.000	12 Laporan	39.920.000	36 Laporan	119.760.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		-	-	35.023.000	-	35.023.000	-	35.023.000	-	105.069.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	12 Laporan	12 Laporan	35.023.000	12 Laporan	35.023.000	12 Laporan	35.023.000	36 Laporan	105.069.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	6 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		-	-	218.460.346	-	218.460.346	-	218.460.346	-	655.381.038	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		-	-	218.460.346	-	218.460.346	-	218.460.346	-	655.381.038	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50 Ha	47.500.000	50 Ha	47.500.000	50 Ha	47.500.000	150 Ha	142.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	50 Ha	90.620.563	50 Ha	90.620.563	50 Ha	90.620.563	150 Ha	271.861.689	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	50 Ha	27.199.783	50 Ha	27.199.783	50 Ha	27.199.783	150 Ha	81.599.349	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	-	12 laporan	-	36 laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	12 Laporan	53.140.000	12 Laporan	53.140.000	12 Laporan	53.140.000	36 Laporan	159.420.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		-	-	39.770.000	-	39.770.000	-	39.770.000	-	119.310.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	39.770.000	-	39.770.000	-	39.770.000	-	119.310.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	39.770.000	1 Dokumen	39.770.000	1 Dokumen	39.770.000	3 Dokumen	119.310.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	-	36 Laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	3 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		-	-	437.250.900	-	437.250.900	-	437.250.900	-	1.311.752.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		-	-	437.250.900	-	437.250.900	-	437.250.900	-	1.311.752.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	99.500.000	12 Unit	99.500.000	12 Unit	99.500.000	36 Unit	298.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	337.750.900	12 Unit	337.750.900	12 Unit	337.750.900	36 Unit	1.013.252.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	15 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	KOTA PALANGK ARAYA
							16.440.428.453		16.440.428.453		16.440.428.453		49.321.285.359		

RPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024–2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA										INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH									
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	FORMULA	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PROGRAM	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL	TARGET			KONDISI AKHIR	PD PELAKSANA
						2024	2025	2026							2024	2025	2026		
1. Meningkatkan Lingkungan Cerdas (Smart and mant) Kerukunan dengan Masyarakat Cerdas (Smart Society) Serta Kesejahteraan Ekonomi Cerdas (Smart Economy)	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Indeks Ketahanan Pangan	$v(i) = \frac{9}{\sum_{i=1}^n x_{ijk}}$	79.65	79.65	79.75	79.50	79.50	PENGINGKATAN DIVERSIFIKASI KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya Perekonomian sektor Strategis Pertumbuhan Produksi Pertanian	1. Ketersediaan an Pangan Utama	$\frac{\text{Jumlah Keluaran Pertanian}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	92.40%	92.40%	92.50%	92.70%	92.70%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2. Skor PPH		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Rawan Pangan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan se - Kota Palangka Raya}} \times 100\%$	91.2	91.2	91.9	95.0	95.0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan - Program Rawan Pangan}}{\text{Jumlah Total Kelurahan}} \times 100\%$	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
										Pengawasan Keamanan Pangan		Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di uji $\geq 80\%$	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rata – Rata Pertumbuhan TPH = RPP + RPBH + RP SAYURAN (bagi 3)	18.5 %	18.5 %	19%	19.5 %	19.5 %	PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rata – Rata Pertumbuhan TPH = RPP + RPBH + RP SAYURAN (bagi 3)	18.5%	18.5%	19%	19.5%	19.5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
										PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
										PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
										PROGRAM PERUIJAN USAHA PERTANIAN									
										PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
			Rata – Rata Perkebunan Produksi	Rata – Rata Perkebunan = R P KARET + RPK Sawit+ RPK Dalam + R P KOPI(bagi 4)	22.70	22.70	23.20	23.70	23.70	PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	Rata – Rata Perkebunan = R P KARET + RP KSawit+ RP K Dalam + R P K Kopi (bagi 4)	22.70	22.70	23.20	23.70	23.70	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	Rata – Rata Pertumbuhan RP Daging + RP Telur (bagi 2)	12.5%	13%	13.5%	14%	14%	PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata – Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	Rata – Rata Pertumbuhan RP Daging + RP Telur (bagi 2)	13%	13%	13.5%	14%	14%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Mengetahui :  
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kota Palangka Raya

  
SUGIYANTO, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700918 199003 1006